

## HANDOUT PERTEMUAN 1

Tujuan Perkuliahan	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
Mahasiswa mampu memahami konsep pendidikan formal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Definisi dan tinjauan tentang pendidikan formal</li><li>2. Fungsi pendidikan formal</li><li>3. Jenis –jenis pendidikan formal</li><li>4. Perkembangan pendidikan formal</li></ol>

### Tinjauan Dasar Pendidikan Formal

Merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, pendidikan formal dimaknai sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Definisi pendidikan formal lainnya: “*A formal education program is the process of training and developing people in knowledge, skills, mind, and character in a structured and certified program*”.

Pendidikan formal biasa juga disebut sebagai sistem persekolahan (Sutjipto, 2005). Sekolah atau *school* diambil dari kata latin *skhole*, *scola*, *scolae*, yang secara harfiah berarti “waktu luang”, atau “waktu senggang”. Dengan demikian pada awalnya bersekolah adalah *leisure devoted to learning* atau waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar.

### Fungsi Pendidikan Formal dan Kritik Terhadapnya

Secara umum pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuha Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana dikutip dari UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 mengenai tujuan pendidikan nasional.

Tuntutan agar terciptanya manusia yang beradab juga kebutuhan dunia kerja merupakan bagian dari fungsi pendidikan formal. Persekolahan dapat dikatakan sebagai hal fundamental bagi masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena secara teknis sekolah mengajarkan masyarakat usia muda tentang pengetahuan, nilai-nilai, dan perilaku yang sesuai dengan norma/aturan sosial yang dominan berlaku. Pendidikan formal sering

dihujani kritikan, antara lain sifatnya yang memaksa peserta didik untuk tunduk kepada penguasa kebijakan, eksesnya dalam menekan keunikan individu dan lebih mengutamakan institusi sosial. Kritik tersebut kemudian menghadirkan alternatif-alternatif pendidikan di luar pendidikan formal sebagaimana dikemukakan Ivan Illich dan Everett Reimer . Bagaimanapun pendidikan formal dirasakan masyarakat masih diperlukan (atau bahkan sangat diperlukan) karena standar kemampuan yang terukur dan mencakup ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Output pendidikan formal juga digunakan sebagai pembanding kualitas sumber daya manusia dari satu negara dengan negara lainnya. Singkatnya, dapat dikatakan pendidikan formal memudahkan dalam pengukuran kemampuan individu.

Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia mampu mengasup pendidikan dasar di tingkat SD. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh bank dunia pada tahun 2005, tinggal 8% anak – anak yang belum mendapatkan pendidikan dasar. Adapun angka partisipasi pada pendidikan menengah pertama dan menengah atas nampaknya masih tertinggal jauh dibanding sekolah dasar.

Adapun mengenai pendidikan tinggi, sampai dengan 2009 angka partisipasi baru mencapai 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Rendahnya partisipasi tersebut dikarenakan angka kelulusan SMA yang juga masih rendah. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat kurang khususnya bila dibandingkan dengan Malaysia (35%) dan Thailand (45%). Selain persoalan akses, pemerintah juga masih bergulat dengan persoalan mutu dan relevansi pendidikan. Kritik terhadap hal tersebut antara lain agar pendidikan tidak lagi dipandang sebagai komoditas, melainkan pelayanan publik. Selain itu model birokratisasi pendidikan perlu diubah menjadi pemberdayaan. Konsekuensi atas hal tersebut, pemerintah diharap mempunyai komitmen kuat antara lain berupa anggaran yang memadai.

### **Klasifikasi Pendidikan Formal**

Berikut ini adalah klasifikasi jenjang dan jenis satuan pendidikan dasar dan menengah.

#### **1. pendidikan dasar**

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Jenis pendidikan yang terdapat pada jenjang ini yaitu umum dan keagamaan. Bentuk – bentuk yang terdapat dalam pendidikan dasar formal yaitu

Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Meskipun demikian bentuk pendidikan dasar nonformal atau yang sederajat dengan bentuk formal juga diakui negara.

## 2. pendidikan menengah

Sebagai pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar, jenjang ini memiliki spesifikasi yang lebih khusus dibanding pendidikan dasar. Pada jenjang ini terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu yang bersifat umum, keagamaan, dan kejuruan. Bentuk pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).

Adapun pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Bentuk-bentuk perguruan tinggi sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

## **Perkembangan Pendidikan Formal**

Sejauh ini banyak yang percaya bahwa pendidikan berasal dari akar peradaban, yang salah satunya peradaban Sumeria. Kala itu dibangun ruang-ruang kelas guna menampung sekitar 30 anak. Penemuan tersebut membawa spekulasi bahwa ukuran ruang kelas umum di jaman modern mungkin didasarkan pada ruang kelas dari batu merah yang diarsitekturi orang-orang Sumeria. Namun demikian catatan tertulis tentang ruang kelas dan sekolah berasal dari Plato dan Aristophanes. Sekolah di Yunani Kuno terbilang sederhana, dan menitikberatkan pada latihan kemiliteran, atletik, musik dan puisi. Adapun membaca dan berhitung hanya sebagai materi pendamping. Metode pendidikan di Yunani kuno kala itu bersifat tutorial atau hubungan perorangan. Ketika Yunani menjadi lebih demokratis dan penambahan murid yang semakin banyak maka metode tersebut digantikan dengan pembelajaran kelompok/klasikal.

Tidak hanya dari Sumeria dan Yunani Kuno, sejarah persekolahan juga dipengaruhi dari Roma dan Turki. Beberapa hal umum yang dipengaruhi antara lain konten, metode, personel, dan lokasi sekolah. Pada masa pra sejarah diduga sudah ada aktivitas persekolahan. Hal ini ditunjukkan pada sebuah gua di selatan Perancis dan

Spanyol yang meninggalkan jejak lukisan hewan pra sejarah. Konten materi kala itu terkait erat dengan ritual masa pra sejarah. Ritual pra sejarah melibatkan juga elemen kurikulum. Mereka sudah memiliki klasifikasi usia karena terkait dengan kelahiran, masa dewasa dan kematian. Perbedaan antara pendidikan pra sejarah dan sejarah ditandai dengan penemuan baca tulis.

Pada masa abad ke-18 dan 19 dominasi pendidikan formal dipengaruhi dengan sistem koloni yang menyebar di seluruh negara. Selanjutnya pendidikan formal dipengaruhi oleh industrialisasi di Eropa dan Amerika. Perkembangan pendidikan formal di Indonesia sendiri dipengaruhi posisinya yang pernah menjadi daerah koloni (Sufyarma, 2003: 8). Sampai saat ini masih banyak pengaruh kolonial pada perkembangan pendidikan formal di Indonesia. Isu penting terkait dengan hal tersebut antara lain perihal kebijakan pendidikan bagi kelompok minoritas, pengembang struktur pendidikan dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial, pengembangan pendidikan untuk daerah miskin, dan ketidakseimbangan pendidikan bagi kelompok-kelompok etnis.

Manajemen pendidikan pada umumnya dan manajemen sekolah pada umumnya di era order baru sangatlah sentralistik. Pada era reformasi, manajemen lembaga pendidikan mulai ditempatkan secara desentralistik diantaranya melalui manajemen berbasis sekolah. Usman (2006: 496) menyebutkan tujuan otonomi daerah di bidang pendidikan antara lain (1) meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih dekat, cepat, mudah, murah, dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menekankan pada prinsip demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (2) pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, (3) memberikan keteladanan, membangun kemauan, (4) mengembangkan kreativitas peserta didik, (5) mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat (peran serta masyarakat), (6) pemerataan dan keadilan, (7) meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, (8) akuntabilitas publik, (9) transparansi, (10) memperkuat integritas bangsa dan (11) meningkatkan daya saing di era global. Melalui kebijakan otonomi daerah sesuai dengan UU RI No 22 tahun 1999, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian besar diserahkan ke pemerintah daerah. Hal-hal yang diserahkan meliputi administrasi pegawai, keuangan, perlengkapan, dokumen pendukungnya. Sallis dalam

Usman (2006: 496) menegaskan bahwa sebagian besar rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan.

### **Sumber Pustaka:**

Anonim. What is Formal Education. 1999.

<http://www.sil.org/lingualinks/literacy/ReferenceMaterials/glossaryofliteracyterms/WhatIsFormalEducation.htm>. Diakses 18 Agustus 2011.

Anonim. 2007. *Asal Usul Sekolah, Academy, Lyceum, Hingga Taman Kanak-Kanak*. <http://yapti.ac.id/artikel/asal-usul-sekolah>.(online). Diakses 18 Agustus 2011.

Anonim. 1971. *Toward The Destruction of Schooling*. <http://anti-politics.net/school/>. (online). Diakses 12 Agustus 2011

Reimer, E. 1971. *School is Dead*. Harmondsworth : Penguin. Diakses 18 Agustus 2011.

Permanasari, I. 2009. *Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi masih Rendah*.

<http://edukasi.kompas.com/read/2009/08/27/20423527/Angka.Partisipasi.Pendidikan.Tinggi.Masih.Rendah>. (Online). diakses 18 Agustus 2011.

Sufyarman. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sutjipto, 2005. *Konsep Pendidikan Formal dengan Muatan Budaya Multikultural*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005. Hal. 53-58.

Usman, H. 2009. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara